

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemerintah daerah Pemerintah Indonesia melaksanakan pemberlakuan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap Pemerintahan Daerah dituntut untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat beberapa komponen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa komponen PAD terdapat salah satu komponen yang sumber penerimaan merupakan yang terpenting yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang dipandang

sebagai salah satu alternative sumber pembiayaan bagi keuangan daerah yang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa suatu daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, diantaranya yaitu 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota.

11 (sebelas) jenis pajak daerah kabupaten/kota tersebut terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan BPHTB. Jenis pajak daerah kabupaten/kota tersebut ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing daerah. Peraturan daerah tersebut ditetapkan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan pendapatan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan daerah, Kabupaten Gresik harus meningkatkan sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, khususnya pada sektor pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut. Target pencapaian Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gresik masih belum maksimal atau masih ada yang belum mencapai target. BPPKAD Kabupaten Gresik selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dan pemungutan pajak daerah guna memperoleh pendapatan yang cukup besar.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik Tugas Akhir guna untuk mengetahui apa yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik”**.

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam Tugas Akhir ini, maka akan diberikan pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan perlakuan evaluasi terhadap kondisi dari data yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul kemudian dapat diinterpretasikan. Kategori atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

2. Efektifitas

Efektifitas menurut Mardiasmo (2004:134) “Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektifitas pajak daerah adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak daerah dengan potensi pajak daerah itu sendiri.

3. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi

yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2010:101) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

1.3 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat merumuskan masalah latar sebagai berikut:

1. Berapa besar efektifitas Pajak Daerah pada pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas ?

2. Berapa besar efektifitas Pajak Daerah Perjenis pada Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas?
3. Berapa besar efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas?
4. Berapa besar kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Gresik tahun 2012-2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis dapat memastikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Daerah Perjenis di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan rasio efektifitas
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan diadakan penelitian ini, dapat memperoleh manfaat-manfaat antara lain yaitu :

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya
 - a. Penelitian digunakan sebagai referensi oleh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya atau mahasiswi lain di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya
 - b. Penelitian digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbanas Surabaya dalam menyusun Tugas Akhir
2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Serta sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas atau penelitian serupa dimasa yang akan datang
3. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam pembangunan daerah melalui Pajak Daerah agar cepat terselesaikan dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan pendapatan daerah sendiri.

1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 (dua) jenis data. Berikut penjelasannya:

1.6.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yang penulis peroleh selama penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kabupaten Gresik untuk memperoleh data actual mengenai efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gresik.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis peroleh selama penelitian yaitu metode kepustakaan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literature artikel, jurnal-jurnal, buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun bahan kuliah yang berhubungan dengan topic.

1.6.2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan lebih mengarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, maka ruang lingkup pembahasannya hanya dibatasi pada uraian efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Gresik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang ditempuholeh penulis yaitu dengan cara mempelajari dan mengamati keadaan yang berhubungan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir sehingga dapat dijadikan landasan dalam pemecahan masalah. Seperti contoh mengenai tata cara penentuan target terhadap pajak daerah, serta mengamati prosentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gresik.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu Bidang penagihan yang berada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik mengenai kendala dan upaya yang dilakukan BPPKAD dalam rangka mengoptimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah, data target pajak daerah, dan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah